

## SUATU STUDI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL SUKU TORAJA TERHADAP 1 PETRUS 2:13-14

Amsal, Yudha Nugraha Manguju

### **Abstract**

*Resistance to the norms used in indigenous peoples is an effort to provide an instrument of equality to all indigenous peoples for the preservation of culture and the strengthening of communal identity. This article discusses the traditional leadership hegemony used by the nobility which continues to experience criticism from the indigenous peoples themselves. Symbolic resistance in the implementation of customs began to be shown in every feast or activity involving customs. The method used in this study is a qualitative method through a postcolonial hermeneutic approach. A leader is said to be a transformative leader if he is able to bring change in the realm of the organization and the development of its members. The link with the traditional leadership in the indigenous Rante Balla community is that it still adheres to the feudal system. Where leaders are determined from lineage and are still valid for generations in indigenous peoples. In contemporary society, according to the author, this leadership style is a leadership style that needs to be transformed so that it is able to adjust to the context of society that develops in various aspects. People who are already restless with this traditional leadership style need to hold resistance or resistance to ideas made unilaterally and imposed by those who consider themselves to be nobility.*

**Keyword:** *Postcolonial Hermeneutics, Traditional Leadership, To Parengnge', Toraja, Rante Balla.*

### **Abstrak**

Resistensi terhadap norma-norma yang dipakai dalam masyarakat adat adalah sebuah upaya untuk memberikan instrumen kesetaraan kepada semua masyarakat adat demi pelestarian budaya dan penguatan identitas komunal. Artikel ini membahas tentang hegemoni kepemimpinan tradisional yang dipakai oleh kaum bangsawan yang terus mengalami berbagai kritikan dari masyarakat adat sendiri. Perlawanan-perlawanan simbolik dalam pelaksanaan adat mulai ditunjukkan dalam setiap pesta atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan adat istiadat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan hermeneutik poskolonial. Seorang pemimpin dikatakan sebagai pemimpin yang transformatif jika mampu membawa perubahan dalam ranah organisasi maupun pengembangan anggota-anggotanya. Kaitan dengan kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat *Rante Balla* adalah kepemimpinan yang masih menganut sistem feodal. Di mana pemimpin ditentukan dari garis keturunan dan masih berlaku secara turun temurun dalam masyarakat adat. Dalam masyarakat

kontemporer, menurut penulis, gaya kepemimpinan seperti ini adalah gaya kepemimpinan yang perlu ditransformasi sehingga mampu menyesuaikan dengan konteks masyarakat yang berkembang dalam berbagai aspek. Masyarakat yang sudah resah dengan gaya kepemimpinan tradisional ini perlu mengadakan resistensi atau perlawanan terhadap paham-paham yang dibuat secara sepihak dan diberlakukan oleh kaum yang menganggap diri sebagai kaum bangsawan.

**Kata Kunci:** Hermeneutik Poskolonial, Kepemimpinan Tradisional, *To Parengnge'*, Toraja, *Rante Balla*.

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan tradisional dalam kebudayaan suku Toraja masih menjadi salah satu kelengkapan dalam adat-istiadat. Pemimpin tradisional atau pemangku adat disebut dengan nama atau diberi gelar sebagai *To Parengnge'* (Orang yang mengayomi) (Manguju, 2020: 115). *Parengnge'* dari kata dasar *Renge'* (*Mangrengnge'*) adalah cara perempuan memikul beban di punggung yang berarti bahwa bertanggung jawab terhadap sesuatu (Kobong, 2008: 106). Fungsi seorang *To Parengnge'* adalah mengayomi masyarakat adatnya dari kelaparan, kemiskinan, penindasan, dan sebagai mediasi penyelesaian konflik-konflik sosial dalam masyarakat. Menurut persepsi golongan kaum bangsawan, proses pemilihan *To Parengnge'* hanya bisa dilakukan oleh kalangan kaum bangsawan saja dan yang bisa dipilih hanya keturunan kaum bangsawan. Kemudian, *To Parengnge'* juga berfungsi sebagai pengambil keputusan untuk memberlakukan sanksi adat jika ada seseorang yang dianggap melanggar norma-norma dalam adat. Seiring dengan masuknya agama kristen protestan di daerah Toraja sistem kepemimpinan adat ini turut diperhatikan oleh para penguasa kolonial untuk melegitimasi masalah kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat adat (Kobong, 2008: 106).

Salah satu masalah yang dibahas oleh Kobong dalam buku *Injil dan Tongkonan* adalah ketika masyarakat adat dan *To Parengnge'* mempersoalkan masalah pembagian daging di dalam setiap pesta yang dilakukan dalam masyarakat adat. Dari sebagian pemangku adat mewajibkan untuk memberikan potongan daging tertentu dan bersifat khusus kepada *To Parengnge'* sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sedangkan sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya kekristenan maka persoalan-persoalan seperti itu tidaklah menjadi keharusan karena sebagian masyarakat telah dibaharui di dalam Kekristenan (Palette, 2020: 77). Perdebatan ini berlanjut di dalam setiap

pertemuan-pertemuan formal oleh tokoh-tokoh agama (gereja) dan para pemangku adat untuk memperjelas wilayah adat dan gereja (Palette, 2020: 77). Karena hal ini menjadi kontroversial di dalam masyarakat antara pemangku adat dan sebagian masyarakat adat yang sudah kristen, maka para zending mencoba memberikan solusi sebagai jalan tengah antara pemangku adat dan pemuka agama bahwa pemberian daging boleh diberikan kepada *To Parengnge'* sebagai bentuk penghargaan terhadap statusnya, bukan lagi karena pemaknaan bahwa pembagian daging merupakan ritualitas yang sakral terhadap *To Parengnge'*.

Kemajuan dan perkembangan pendidikan melahirkan persepsi baru di dalam masyarakat adat terhadap regulasi kepemimpinan *To Parengnge'* mulai berubah, baik pada pemahaman tentang syarat pergantian menjadi *To Parengnge'*, pelaksanaan fungsi kepemimpinannya maupun pemberlakuan sanksi adat jika ada masyarakat adat yang melanggar norma. Sistem pergantian kepemimpinan dan pemberlakuan sanksi (tanpa norma-norma) merupakan pengumpulan kolektif orang-orang yang berada dalam wilayah *Kaparengngesan* (Pemerintahan adat). Masyarakat menganggap perlu adanya ruang bagi semua masyarakat adat untuk bisa menjadi *To Parengnge'* dengan syarat-syarat yang tidak bersifat feodal atau monarki. Kemudian, pemberlakuan sanksi adat perlu didasari dengan norma-norma adat yang merupakan hasil dari konstruksi dan konsensus bersama dalam masyarakat bukan pemberlakuan sepihak dari *Parengnge'*. Mengapa demikian? Karena sistem yang sampai hari ini diberlakukan di dalam masyarakat adata dalah pemberlakuan saksi tanpa adanya norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama masyarakat adat. Dominasi *To Parengnge'* mengenai pemberlakuan sanksi selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan di dalam masyarakat. Salah satu pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat adalah "dapatkah ikan kecil memakan ikan besar"? artinya bahwa kaum yang menganggap dirinya sebagai kaum bangsawan selalu "memakan" kaum yang dianggap biasa atau golongan status rendah di dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dapat membantu agama, pemerintah, dan masyarakat memahami keberadaannya sebagai lembaga atau instansi sosial dalam masyarakat. Penindasan struktural yang tertuang dalam berbagai norma-

norma budaya yang menekankan suatu resistensi terhadap praktek-praktek kekuasaan secara simbolik di dalam masyarakat. Perumusan norma-norma baru dapat dilahirkan dari studi ini dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern, khususnya masyarakat adat yang setiap saat dibenturkan dengan ilmu pengetahuan.

Tahapan pertama dari pendekatan studi pustaka yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data baik primer dan sekunder untuk melihat konteks kehidupan masyarakat Toraja di Rantai Damai. Kedua, penulis akan menganalisa setiap sumber yang ada untuk melihat keaslian sumber dan sejauh mana sumber kebenaran informasi tersebut dapat dipercaya untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Ketiga, penulis akan melakukan interpretasi terhadap berbagai sumber tersebut untuk dianalisis dan disatukan sebagai fakta yang otentik. Setelah semua proses dilakukan maka penulis akan menyajikan setiap data sebagai analisis teologis-biblis mengenai kepemimpinan tradisional terhadap 1 Petrus 2:13-14.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentangan Identifikasi Konteks.**

Masyarakat adat *Rante Balla* akan mengalami kepunahan jika masih mempertahankan model atau pola kepemimpinan yang bersifat kolonial. Seharusnya sistem kepemimpinan yang dibangun adalah kepemimpinan yang bersifat terbuka, demokratis, dan musyawarah untuk mufakat. *Parengnge'* sebagai pemimpin tradisional dalam masyarakat adat tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang mengedepankan asas musyawarah mufakat secara kolektif dalam pengambilan keputusan. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat *Rante Balla*. Pertama, Konstruksi sosial masa lampau menjadi legitimasi keturunan kaum bangsawan untuk mempertahankan pola ini. Dengan pemahaman bahwa tidak ada yang bisa menjadi pemimpin di dalam adat (*To Parengnge'*) jika bukan dari garis keturunan bangsawan. Kedua, secara politis pendidikan tentang kebudayaan di masyarakat tidak menjadi perhatian masyarakat luas, sehingga masyarakat pun menerima dalam keadaan terpaksa dan bersungut-sungut. Dalam perkembangannya, masyarakat mulai menyadari bahwa identitas kebudayaan itu

sangat penting dan keberadaaan hari ini menggambarkan bahwa adat *Rante Balla* sedang berada dalam bayang-bayang kepunahan. Berada dalam bayang-bayang kepunahan karena, pertama, Tidak adanya norma-norma adat yang tertulis secara baku. Kedua, tidak adanya sosialisasi tentang adat kepada masyarakat, khususnya bagi pemuda. Ketiga, kurangnya efek kepemimpinan bagi masyarakat adat.

Beberapa pola kekuasaan yang masih digunakan dalam masyarakat adat, yang pertama adalah melegitimasi kekuasaan sebagai bagian dari perangkat kebudayaan. Kedua, melegitimasi hierarki kepemimpinan dalam kebudayaan hanya dalam golongan keluarga tertentu. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada kebangsawanan tanpa yang lain? Kemudian bagaimana sejarah pembentukan sistem kerja dalam *kaparengngesan*? Dalam hal ini, penulis sebagai pembaca dan penafsir konteks memiliki pandangan yang berbeda dalam pola-pola kepemimpinan yang harus dilakukan dalam kebudayaan. Unsur-unsur penting yang perlu dipertimbangkan saat menata struktur dan regulasi dalam kebudayaan adalah melakukan pendekatan interdisipliner sangat dibutuhkan jika ingin melestarikan kebudayaan. Pendekatan interdisipliner dapat membantu memahami dan menciptakan pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap konteks. Selain itu, pemikiran *Homi Bhabha* tentang bagaimana cara memperjumpakan kesenjangan dalam masyarakat adalah penting untuk menciptakan “ruang ketiga sebagai ruang interaksi simbolik” (Martono, 2012: 162). Ruang ketiga yang dimaksud adalah teks yang dapat diwujudkan dalam karya, seni dan tulisan-tulisan. Ruang ketiga ini bersifat terbuka untuk bisa dipelajari, dimaknai dan diperbaharui setiap saat seiring dengan perubahan masyarakat.

Bagaimana kaum bangsawan (*Parengnge*) mengonstruksi identitas dan praktek hegemoni mereka. Sebaliknya, bagaimana kaum non bangsawan mengonstruksi identitasnya sebagai kaum yang sedang dijajah. Kedua hal ini akan dilihat bagaimana relasi yang terjadi dalam masyarakat adat. Konstruksi kaum yang menganggap diri sebagai kaum bangsawan memiliki kepentingan tersendiri dalam keluarga dan masyarakat. Kenapa tidak ada ruang bagi yang lain untuk menjadi pemimpin adat? dan mereka selalu memonopoli kegiatan-kegiatan adat. Penulis beranggapan bahwa *kaparengngesan* adalah bagian dari konstruksi politik yang memiliki tujuan untuk mendominasi kekuasaan dalam tataran kepemimpinan adat. Aturan-aturan yang diberlakukan dalam masyarakat tidak jelas karena hanya bersifat lisan dan pemberlakuannya pun hanya merujuk pada tradisi-tradisi sebelumnya. Melemahnya kekuatan hukum adat akan mempengaruhi eksistensi

keberadaan adat. Persoalan-persoalan baru kemudian muncul sebagai tantangan bagi dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Argumentasi utama tulisan ini pada kajian perspektif hermeneutik poskolonial terhadap hegemoni kepemimpinan dalam masyarakat adat *Rante Balla* adalah masyarakat adat harus berupaya mendekonstruksi secara kolektif tentang norma-norma yang mengikat dan melawan setiap praktek kekuasaan *Parengnge'* yang tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain itu, masyarakat adat juga harus mempelajari aspek-aspek budaya sehingga tidak gagal paham terhadap adat istiadat. Pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh masyarakat perlu menjadi konstruksi baru dalam masyarakat bahwa kehidupan masa lampau tidak sama lagi dengan kehidupan masa kini, dinamika masyarakat masa lalu tidak sama lagi dengan dinamika masa kini. Sumber daya manusia masyarakat telah mengalami banyak perkembangan, baik dari segi pemerintahan maupun partisipasi dalam bidang-bidang lain. Masyarakat yang masih dikekang dengan berbagai persepsi adat (termasuk masalah status sosial dalam masyarakat) perlu perhatian serius dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian penulis sebagai bahan kajian dalam penulisan karya ini. Tujuan dari penulisan karya ini adalah berupaya mengangkat martabat kemanusiaan masyarakat adat *Rante Balla* bahwa pentingnya pembaharuan dalam sistem adat demi keberlangsungan adat yang merangkul, membebaskan, dan memberi ruang bagi semua masyarakat adat.

### **Studi Poskolonial**

Studi poskolonial melahirkan banyak kesadaran baru dalam memandang budaya dan identitas masyarakat. Studi poskolonial di sini bukan hanya dalam pengertian negara penjajah dan negara jajahannya, melainkan pada kondisi pascakolonial yang masih menjadi persoalan mendasar mengenai stratifikasi sosial dan keadilan di dalam budaya. Suatu upaya strategi politik kaum yang dianggap sebagai budak untuk melakukan sebuah penolakan atau resistensi terhadap praktek kolonial (hegemoni) kekuasaan yang masih diberlakukan dalam masyarakat adat dan kemudian menawarkan suatu kebebasan atau kesetaraan.

Kondisi yang egaliter dalam masyarakat modern memungkinkan masyarakat hidup di dalam budaya yang harmonis serta partisipasi yang konstruktif dari semua elemen budaya dan masyarakat jika dalam praksis kebudayaan tidak merugikan,

mengasingkan dan bahkan mendiskriminasi satu dengan yang lain. Resistensi kaum atau kelompok yang tidak dianggap layak dan pantas menjadi seorang pemimpin di dalam masyarakat adat penting untuk merekomendasikan pola pikir secara konseptual dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan dari berbagai fasilitas yang tersedia di dalam masyarakat, termasuk pendidikan tentang kebudayaan. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah bentuk sosialisasi identitas kebudayaan demi penyebaran pengetahuan tentang kebudayaan. Masyarakat adat berpotensi bersikap apatis jika tidak mengetahui arah dan tujuan berbudaya. Maka dari itu, penulis ingin merekomendasikan pemikiran ini sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan terhadap kebudayaan yang masih menghidupi praktek-praktek kolonialisasi.

Status sosial dalam masyarakat feodal serta sistem kasta merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari masyarakat adat. Stratifikasi sosial menunjuk pada sistem pelapisan masyarakat yang di dalamnya terdapat status atau pelapisan sosial yang berlaku secara hierarki. Dua hal yang perlu diperhatikan di dalam memahami stratifikasi sosial, yakni, stratifikasi sosial yang sifatnya tertutup dan menggunakan istilah kasta atau kelas sedangkan stratifikasi sosial terbuka di dalam alam demokrasi menggunakan istilah pelapisan di dalam masyarakat. Pembahasan kasta di dalam masyarakat adalah masyarakat dalam situasi praindustri, yakni ikatan marga (Ikatan darah). Faktor pendidikan adalah faktor perbaikan nasib seseorang dan faktor yang memungkinkan orang untuk meningkatkan status sosialnya di dalam masyarakat. Menurut Davis dan Moore, stratifikasi adalah suatu kebutuhan fungsional. Semua masyarakat membutuhkan sistem demikian dan kebutuhan itu menghasilkan sistem stratifikasi (Ritzer, 2012: 403).

Dasar dari stratifikasi sosial adalah bentuk upaya pembagian kerja dalam masyarakat. Siapa yang membagi? Mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang berpotensi untuk menguasai yang lain dengan merumuskan peraturan-peraturan yang dilegitimasi sebagai konstruksi budaya dan kemudian dilanjutkan dengan stratifikasi biologik (Stratifikasi secara turun temurun dari garis keturunan). Unsur pembagian kerja sebagai unsur pembentukan stratifikasi sosial dan unsur biologis sebagai konsekuensi yang tidak terkontrol dalam wacana pembentuknya.

Ras dan kelas dalam konteks studi poskolonial adalah bagian yang masih menjadi perhatian orang-orang yang mendambakan kehidupan yang harmoni dan

sejahtera. Ideologi yang melegitimasi superioritas ras mudah diterjemahkan ke dalam kerangka dan macam-macam kelas (Kelas yang ditentukan karena keturunan bangsawan, ekonomi, politik, dan pendidikan). Superioritas kaum bangsawan menyiratkan bahwa orang-orang di luar kaum bangsawan selamanya tidak bisa menjadi pemimpin di dalam masyarakat adat. Dengan demikian, misi imperial terus teraktualisasi dalam pemahaman-pemahaman yang mendiskriminasi masyarakat lainnya. Praktik kolonial yang terjadi di dalam masyarakat adat *Rante Balla* bekerja sampai hari ini secara terstruktur dan dinamis. Sistem kasta yang sudah berlaku sejak lahir berdasarkan garis keturunan yang telah dikonstruksi oleh budaya. Individu yang sejak lahirnya dari kalangan yang dianggap kaum bangsawan di dalam masyarakat memiliki aliran status sosial yang mengalir di dalam masyarakat. Untuk lebih memahami situasi seperti ini, penulis sepakat dengan pemahaman Habermas, bahwa tradisi tidak hanya untuk diteruskan, kita juga dapat putus darinya karena kita tidak bersikap pasif terhadap tradisi dan otoritas, melainkan juga bersikap kritis, sehingga penerimaan atas legalitas tradisi juga tergantung pada refleksi kita atasnya (Hardiman, 2015: 216).

Bagaimana pemahaman ini menstruktur hubungan masyarakat dalam perspektif sosio politik? Ania Loomba mengatakan bahwa studi-studi ekstensif tentang bagaimana modernisasi mengikis struktur-struktur sosial tradisional itu didorong oleh kecemasan-kecemasan kolonial terhadap kehilangan kendali, solusi yang disarankan adalah pemerintahan tidak langsung, di mana masyarakat akan dikendalikan melalui para pemimpin tradisional dan praktek-praktek adat (Loomba, 2016: 180). Dinamika terhadap situasi kepemimpinan tradisional sangatlah berkaitan dengan situasi sosio politik yang kemudian diinternalisasikan di dalam struktur masyarakat adat. Yang menentukan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh komunikasi dan jaringan interaksinya. Komunikasi dan jaringan interaksi yang memungkinkan seseorang menempatkan posisi strategisnya di dalam masyarakat dan kemudian menerapkan suatu sistem kekuasaan dengan kemampuan memberi batasan-batasan tertentu kepada orang lain untuk mencapai tujuannya dengan terus mewacanakan keabsolutan norma. Hierarki kekuasaan kini mengakar di dalam masyarakat sebagai hasil dari ketertutupan sistem sosial.

Menurut Sindung Harianto, ukuran kelas berdasarkan pada pengelompokan pekerjaan sedangkan status diukur dari rangkaian pekerjaan berdasarkan pada jarak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu penelitian ini dilandaskan

pada pertanyaan apakah hegemoni kekuasaan pemimpin adalah hal yang mutlak diterima dalam ketertundukan? Bagaimana orang-orang atau komunitas Kristen dalam konteks teks 1 Petrus mengalami ketidakadilan? Dengan memakai legitimasi bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, maka secara harfiah pemikiran ini memiliki makna yang ganda. Pemaknaan yang pertama bisa dimaknai dalam pemahaman bahwa pemimpin adalah wakil Allah yang harusnya diperlakukan dan dihormati sebagai wakil Allah. Sedangkan pemaknaan yang kedua adalah melahirkan ketertundukan orang-orang yang menaruh kepercayaan fundamentalis terhadap pemimpin yang ditentukan dan Allah. Tujuan dari penerimaan ini adalah untuk menjaga harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat.

Secara terselubung mereka melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Penolakan secara halus mereka lakukan dalam praktek kesetiaan terhadap adat istiadat. Mereka tidak menolak ideologi atau ajaran adat istiadat dan agama secara radikal, melainkan mentransformasi berbagai ajaran Kekristenan dalam praktek kehidupan mereka dalam rumah tangga dan masyarakat. Konteks teks yang relevan: Himpunan penulis surat 1 Petrus kepada komunitas Kristen supaya melakukan hal yang baik di tengah-tengah masyarakat non-Yahudi. Konsekuensi beriman kepada Kristus adalah siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada Kristus dalam situasi apapun. Termasuk tulus hati dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga dalam masyarakat sebagai bentuk kesetiaan dengan tetap meneladani Kristus.

### **Mendefinisikan Konteks dalam Surat 1 Petrus 2:13-14**

Teks keagamaan (Alkitab) yang potensial untuk ditafsirkan adalah surat 1 Petrus 2:13-14 "Tunduklah, Karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi". Menurut Amran Efraim, teks 1 Petrus 2:13-14 dapat dimaknai sebagai suatu resistensi terhadap bentuk kepemimpinan yang diskriminatif (Efraim, 2023: 46). Meskipun demikian, Petrus tetap mengingatkan kepada umat agar tetap tunduk pada otoritas pemerintahan. Dengan sikap hormat dan tunduk kepada penguasa maka segala upaya untuk menindas dan menganiaya umat Kristen dapat diminimalisir (Efraim, 2023: 46). Menurut Vayen Limpele, Kata tunduklah dalam teks aslinya adalah Ὑποτάγητε *verb imperative aorist passive 2nd person plural from ὑποτάσσω* yang diterjemahkan sebagai (1) *active subject, bring under firm control, subordinate* (2) *passive with a*

*middle sense; (a) with a component of compulsion have to submit. (b) with a component of voluntary submission be submissive, obey, subject oneself* (Limpele, 2023: 42). Tentu nasihat yang diberikan oleh Petrus relevan dengan konteks pada masa itu. Namun, pada masa kini model kepemimpinan yang membuat masyarakat justru mengalami penderitaan juga perlu dikritik bahkan dilawan jika merugikan tatanan kehidupan bersama. Dengan kata lain, sikap tunduk dan hormat kepada pemerintah diperlukan dalam tatanan kehidupan bersama, tetapi juga perlu disertai dengan sikap kritis dan resistensi apabila pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan keberlanjutan hidup masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pengalaman masyarakat adat yang penulis konstruksikan di atas, maka bisa saja orang-orang yang sementara diperhamba oleh praktik kekuasaan atau kepemimpinan akan menerimanya dalam kepasrahan dan ketertundukan demi menjaga harmonisasi sosial yang sebenarnya menguntungkan kaum bangsawan dan merugikan masyarakat adat. Pemahaman bahwa kelembagaan yang dibentuk oleh Allah akan mempengaruhi pemahaman dan psikologi manusia bahwa lembaga masyarakat adat merupakan bentukan dari Allah dan sebagai sarana Allah untuk menyatakan maksud-maksudNya melalui pemimpin adat. Konstruksi pengalaman di atas bisa didialogkan atau menginterpretasikan teks dari perspektif studi poskolonial. Resistensi yang bisa dimunculkan terhadap teks adalah melawan ideologi dan praktek-praktek kepemimpinan yang tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya sesuai dengan kepentingan kolektif dalam masyarakat. Konstruksi pengalaman manusia atau masyarakat adat *Rante Balla* bukan lagi dipahami sebagai masyarakat yang berada dalam perhambaan, tetapi masyarakat yang memiliki ruang untuk memerdekakan dirinya dari hegemoni kekuasaan. Hal yang perlu dipertimbangkan dari pendekatan ini mengenai dampak penafsiran dalam konteks. Konsekuensi positif dan negatif akan menjadi pertimbangan serius sang penafsir. Surat petrus merupakan surat edaran dan sekaligus surat penggembalaan bagi komunitas Kristen yang mengalami penganiayaan dan penderitaan. Penganiayaan dan penderitaan yang dialaminya dipahami sebagai bagian dari konsekuensi mengikut Kristus.

Surat 1 Petrus ditulis pada saat zaman Nero, latar belakang penulisan kitab 1 Petrus adalah pada saat komunitas atau orang-orang Kristen berada dalam situasi penderitaan dan penganiayaan karena Iman kepada Kristus (Efraim, 2023: 46). Ketaatan kepada pemerintah adalah suatu keharusan yang dilaksanakan demi keteraturan negara (Limpele, 2023: 42). Pemerintah harus melaksanakan

kepemimpinan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan penuh kejujuran. Sedangkan keteladanan dalam memerintah dan menaati pemimpin adalah dengan meneladani Yesus yang setia dalam penderitaan karena kebenaran dan kejujuran. Hal ini dituliskan sebagai bentuk penghiburan bagi komunitas Kristen. Konteks Budaya, Politik, hukum (Sistem hukum yang diberlakukan dalam konteks teks adalah masyarakat dituntut untuk menghormati Kaisar dengan mempersembahkan korban kepadanya, jika menolak maka akan dikenakan hukuman mati) dan agama dalam konteks teks.

*Fiorenza* dalam buku mengatakan bahwa konteks dalam surat 1 Petrus merupakan wacana Yunani-Romawi tentang *politeia* dengan tiga bagiannya, yakni, wacana tentang kewajiban mengenai negara, tentang rumah tangga, dan tentang perkawinan. Fokus utama penulis dalam wacana ini adalah pada percakapan yang dimulai dengan suatu tuntutan ketaatan terhadap pemerintahan manusia (2:13-14) dan kemudian melihat suatu himbauan kepada para hamba untuk taat kepada para tuan atau pemerintah. *Fiorenza* menyebutkan bahwa ada titik konflik yang terjadi antara komunitas kristen dengan masyarakat sekelilingnya. Status sebagai pendatang atau orang asing adalah sebuah konsekuensi yang komunitas Kristen harus tanggung dalam menjaga kesetiaannya kepada Kristus. Penindasan dan penderitaan yang mereka alami dilihat sebagai ujian yang kesetiaan mereka terhadap kemuliaan Allah. Penulis 1 Petrus menyiratkan bagaimana selayaknya komunitas Kristen bertahan dalam situasi yang mereka alami. Dengan bermodalkan iman dan kepercayaan terhadap pengajaran akan Kristus, maka komunitas dihibau oleh penulis surat 1 Petrus untuk tetap bertahan di dalam penderitaan dengan terus berbuat baik.

Ketaatan yang diserukan bagi komunitas Kristen adalah suatu strategi untuk menjalankan misi Kekristenan dalam praktek kehidupan yang tenang dan tidak melakukan perlawanan secara radikal kepada para penindas (tuan dan para suami terhadap hamba dan istri). Praktik ini bukan berarti tidak melakukan suatu upaya untuk keluar dari situasi perbudakan. Upaya yang mereka lakukan adalah dalam bentuk perlawanan simbolik, yakni sebuah penyadaran dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan terhadap aturan-aturan tradisi keagamaan dan negara. Hal ini dilakukan demi menangkal setiap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada mereka sebagai orang kafir (menyimpang dari ajaran adat istiadat dan agama).

Uraian *Fiorenza* menggambarkan situasi ketegangan konflik yang dialami

oleh komunitas kristen dengan masyarakat sekelilingnya. Sebagai komunitas yang minoritas dan asing, komunitas kristen diperhadapkan dalam kondisi yang dimarginalkan dan bahkan dianggap sebagai komunitas yang kafir karena tidak mengikuti aturan adat istiadat dan keagamaan *paterfamilias*. Pemahaman fundamentalis terhadap doktrin keagamaan dalam uraian aturan-aturan negara yang mendistribusikan legitimasi bahwa hanya agama yang diakui oleh negara yang dapat dijadikan pedoman aturan berperilaku di dalam masyarakat, selain daripada itu adalah sebuah penghinaan kepada adat istiadat, agama, dan negara. Visi alternatif kesetaraan di dalam Kristus dianggap sebagai ancaman yang merusak tatanan patriarkhal Yunani-Romawi. Karena dianggap sebagai ancaman bagi adat istiadat maka tidak jarang penganiayaan dan penghinaan dialami oleh komunitas Kristen. Penulis menginternalisasikan Panggilan Kristus dengan memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan kepada "tuan-tuan". Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi sebuah tuduhan-tuduhan bagi mereka yang disebut sebagai penghancur tatanan adat istiadat atau agama. Ketegangan yang muncul dalam masyarakat antara kaum bangsawan dan masyarakat adat adalah suatu konflik yang memunculkan penolakan dan perjuangan kesetaraan. Sama halnya ketegangan konflik yang terjadi dalam konteks teks antara pemimpin adat istiadat dan keagamaan yang merasa terancam dengan kehadiran komunitas Kristen yang mempraktekkan semangat kesetaraan dan pembebasan.

### **Temuan-Temuan Studi Hermeneutik Poskolonial.**

Merujuk pada konstruksi pengalaman kontek masyarakat adat *Rante Balla*, konteks komunitas Kristen, dan masyarakat konteks teks 1 Petrus, penulis berupaya memaparkan beberapa temuan-temuan studi hermeneutik poskolonial dalam tulisan ini. *Pertama*, Adat istiadat masyarakat *Rante Balla* adalah sebuah konstruksi sosial politik. Tujuan daripada keberadaan masyarakat adat ini adalah suatu pembentukan identitas komunal dengan segala kreatifitas, kepercayaan, nilai, dan struktur-struktur sosialnya. Struktur sosial yang menjadi corak dalam masyarakat adat *Rante Balla* mengenai stratifikasi sosial atau kelas-kelas sosial. *Kedua*, memahami konteks teks 1 Petrus adalah suatu upaya yang penulis lakukan dalam penulisan ini. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Fiorenza bahwa adat istiadat dalam kontek teks 1 Petrus adalah adat istiadat yang masih kental dengan budaya patriarki. Budaya ini mengonstruksikan laki-laki sebagai yang tertinggi atau yang berkuasa baik di dalam keluarga, masyarakat, agama

maupun negara. Komunitas Kristen yang hidup dalam situasi budaya ini berupaya mengadaptasikan dirinya dengan adat istiadat, keagamaan dan aturan-aturan negara. Mereka dianggap sebagai orang-orang atau agama kafir dan bahkan mengalami penganiayaan, penindasan, dan pembunuhan jika tidak mengikuti adat istiadat, agama, dan aturan-aturan negara.

Dengan berlandaskan pada konstruksi pengalaman masyarakat adat *Rante Balla*, maka penulis berupaya membaca teks 1 Petrus 2 : 13-14 dan melihat korelasi atau kedua konteks di atas dalam perspektif studi hermeneutik poskolonial. Secara umum, konteks masyarakat adat *Rante Balla* tidak lagi hidup dalam masa penjajahan suatu negara, melainkan hidup dalam praktik-praktik kolonialisme. Sistem kepemimpinan yang diberlakukan adalah sebuah corak kolonialisasi yang di mana mendiskriminasi dan memarjinalkan satu dengan yang lain. Mereka yang menganggap diri sebagai kaum bangsawan adalah para penjajah baru di dalam masyarakat adat. Norma-norma lisan yang dikonstruksikan di dalam masyarakat adat adalah suatu upaya untuk menghegemoni masyarakat adat. Identitas kebangsawanan masih dipertahankan dan bahkan menjadi konstruksi sosial, bukan hanya secara politis tetapi secara biologis dan budaya. Jadi manusia yang lahir dari garis keturunan kaum bangsawan adalah individu yang secara otomatis menjadi keturunan kaum bangsawan. Keterlibatan kritis masyarakat adat dalam mempertahankan identitas komunalnya adalah melakukan perlawanan dengan merekomendasikan berbagai pemahaman yang sifatnya tidak mendiskriminasi satu dengan yang lain. Kepatuhan selama ini adalah bentuk kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemimpin tradisional demi menciptakan sebuah harmoni sosial.

Sedangkan konteks dalam teks 1 Petrus menggambarkan suatu praktik kolonialisasi yang dialami oleh komunitas-komunitas Kristen. Kedudukan pemerintah Yunani-Romawi, pemuka agama, dan petua-petua adat istiadat memainkan peranannya sebagai pemimpin dalam suatu komunitas yang harus ditaati secara mutlak di dalam masyarakat. Aturan-aturan keagamaan, adat istiadat, dan negara adalah sebuah aturan yang harus diikuti oleh setiap masyarakat. Jika tidak mengikuti aturan tersebut maka penindasan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan akan dialami oleh orang-orang yang menentang kekuasaan. Praktik kolonialisme terjadi dan dirasakan oleh komunitas Kristen karena harus menerima ajaran agama *paterfamilias*, mengikuti adat istiadat, dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh negara. Kondisi penindasan dialami oleh kaum perempuan

yang tidak memiliki hak suara di ranah publik dan komunitas kristen yang dianggap sebagai orang asing dan kafir. Dari kedua konteks di atas, dominasi identitas, ideologi, dan norma adalah suatu praktik kolonialisasi yang dipaksakan kepada masyarakat adat *Rante Balla* dan komunitas Kristen.

### **Menuju Kepemimpinan Transformatif**

Kepemimpinan transformatif adalah gaya kepemimpinan yang mengembangkan komunitasnya dengan pembangunan sumberdaya manusia (Manguju, 2024: 118). Seorang pemimpin dikatakan sebagai pemimpin yang transformatif jika mampu membawa perubahan dalam ranah organisasi maupun pengembangan anggota-anggotanya. Kaitan dengan kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat *Rante Balla* adalah kepemimpinan yang masih menganut sistem feodal. Di mana pemimpin ditentukan dari garis keturunan dan masih berlaku secara turun temurun dalam masyarakat adat. Dalam masyarakat kontemporer, menurut penulis, gaya kepemimpinan seperti ini adalah gaya kepemimpinan yang perlu ditransformasi sehingga mampu menyesuaikan dengan konteks masyarakat yang berkembang dalam berbagai aspek. Masyarakat yang sudah resah dengan gaya kepemimpinan tradisional ini perlu mengadakan resistensi atau perlawanan terhadap paham-paham yang dibuat secara sepihak dan diberlakukan oleh kaum yang menganggap diri sebagai kaum bangsawan. Menurut Yul Damayanthi, model kepemimpinan sangat mempengaruhi manajemen dalam masyarakat dan gereja (Damayanthi, 2014: 6). Norma-norma yang masih bersifat diskriminatif perlu dirumuskan ulang dengan mempertimbangkan berbagai nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, baik itu dari segi pemerintahan maupun keagamaan. Seperti hanya yang dimaksud oleh *Bhabha* bahwa dalam proses perubahan budaya perlu merumuskan ruang ketiga untuk memperjumpakan berbagai ketegangan-ketegangan konflik di dalam budaya. Ruang ketiga yang dimaksud adalah teks baru, yakni teks yang bersifat terbuka untuk dikritisi demi pemberian makna untuk semua. Untuk menjaga harmoni sosial dan identitas komunal dalam masyarakat adat *Rante Balla* perlu keterlibatan kritis semua elemen masyarakat adat untuk mendialogkan berbagai aspek-aspek kebudayaan yang masih menjadi permasalahan. Khususnya masalah kepemimpinan yang hanya bisa diduduki oleh kaum bangsawan.

## KESIMPULAN

Resistensi terhadap paham dan praktek kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat *Rante Balla* perlu perjuangan yang lebih serius dari anggota-anggota masyarakat adat. Perjuangan yang dimaksudkan bukanlah perjuangan dalam bentuk fisik, melainkan perjuangan yang bisa dibangun dalam bentuk pendidikan budaya dalam masyarakat kemudian mendekonstruksi norma-norma adat secara tertulis sebagai pegangan bersama. Konstruksi tersebut merupakan pemahaman bersama bahwa adat seharusnya dipandang sebagai komunitas bersama yang menata dan membebaskan kehidupan masyarakat adat dari pemahaman dan praktek kehidupan yang bersifat diskriminatif. Pemahaman inilah yang kemudian berpotensi melahirkan pandangan bahwa seharusnya adat itu bersifat membebaskan dan semua masyarakat adat memiliki kebebasan, hak, dan tanggung jawab dalam memainkan perannya sebagai masyarakat adat.

Resistensi terhadap norma-norma yang dipakai dalam masyarakat adat adalah sebuah upaya untuk memberikan instrumen kesetaraan kepada semua masyarakat adat demi pelestarian budaya dan penguatan identitas komunal. Hegemoni yang dipakai oleh kaum bangsawan terus mengalami berbagai kritikan dari masyarakat adat sendiri. Perlawanan-perlawanan simbolik dalam pelaksanaan adat mulai ditunjukkan dalam setiap pesta atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan adat istiadat. Keberadaan adat semakin mengalami keterancaman identitas dan posisi dalam masyarakat, di mana agama dan institusi pemerintahan semakin menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat. Hal ini juga merupakan seruan dengan harapan bahwa keterlibatan kritis masyarakat adat terhadap ranah pemerintahan, agama, dan budaya sangat dibutuhkan untuk meleburkan nilai-nilai yang dapat dimaknai secara kolektivitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fiorenza, Schussler Elizabeth. (1997) *Untuk Mengenang Perempuan Itu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Hardiman, F. B. (2015) *Seni Memahami*. Yogyakarta: Kanisius.

Haryanto, Sindung. (2016) *Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

Kobong, T. (2008) *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Loomba, A. (2016) *Kolonialisme/Pascakolonialisme* (H. Hadikusumo, Penerj.; Cetakan pertama). Yogyakarta: Narasi.

Manguju, Y. N. (2024) *E-Klesiologi: Dinamika Berkomunitas dalam Upaya Membangun Gereja Digital*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Martono, N. (2012) *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ritzer, G. (2012) *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Artikel Jurnal

Efraim, A. (2023) Gerejaphobia: Refleksi Surat 1 Petrus 2:11-17 Dalam Merespons Diskriminasi Terhadap Gereja di Indonesia. *SAINT PAUL'S REVIEW*, 3 (1) Juni, pp. 36-51. <https://doi.org/10.56194/spr.v3i1.31>

Limpele, V. (2023) Kekristenan di Tengah Pluralitas: Analisis 1 Petrus 2:11-17. *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 3 (1) Juni, pp. 34-45. <https://doi.org/10.53674/teleios.v3i1.54>

Manguju, Y. N. (2020) Nilai Teologis Masikka': Sebuah Ritus di Rantai Damai. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 3 (1) Juni, pp. 114-127. <https://doi.org/10.34307/b.v3i1.169>

Palette, J. (2020) Analisis Pertumbuhan Iman Gereja Toraja Jemaat Situru' pada Masa Konflik DI/TII Tahun 1952-1966. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 3 (1) Juni, pp. 76-89. <https://doi.org/10.34307/b.v3i1.168>

## Tesis

Damayanthi, Y. (2014) *Peran Kepemimpinan Dalam Manajemen: Suatu Studi Kritis Terhadap Peran Kepemimpinan Badan Pekerja Sinode Dalam Manajemen Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu dari Kacamata Teori Manajemen Menurut Adizes* [Masters, Universitas Kristen Duta Wacana]. <https://katalog.ukdw.ac.id/5552/>